

KONSEP REVOLUSI PENDIDIKAN KARAKTER DI INDONESIA PADA ERA PROKLAMASI KEMERDEKAAN SAMPAI ERA REFORMASI

¹Hafizhah Hamim Nasution

¹Hafizhahhamim@gmail.com

¹STKIP Budidaya Binjai

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui perkembangan pendidikan karakter pada era proklamasi kemerdekaan, orde baru, sampai reformasi serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan karakteristik perkembangan pendidikan karakter di Indonesia. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah library research atau kepustakaan, yakni metode penelitian yang diperoleh berdasarkan literature atau kepustakaan dengan melakukan analisis terhadap fakta dan data dari sumber pustaka dan dokumen, sehingga menghasilkan suatu analisis yang mendalam. Secara sederhana langkah kerja penulisan sejarah yang digunakan, meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pada era proklamasi kemerdekaan, pendidikan karakter bertujuan untuk membangun manusia susila yang arif bijaksana, demokratis, bertanggung jawab pada kesejahteraan masyarakat, cinta terhadap tanah air, dan memiliki jiwa patriot yang tinggi. Persamaan pendidikan karakter di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai reformasi adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan landasan sikap, perilaku, dan tindakan warga negara. Pada urusan pemerintahan keduanya digunakan sebagai landasan pembuatan dan pengambilan kebijakan dalam implementasi pendidikan karakter. Perbedaan pendidikan karakter dari proklamasi kemerdekaan sampai reformasi dipengaruhi oleh aspek sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan terhadap kebijakan pendidikan karakter yang diambil.

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Era Proklamasi Kemerdekaan, Era Orde Baru, Era Reformasi.

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to find out the development of character education in the era of the proclamation of independence, the new order, to the reformation and to find out the similarities and differences in the characteristics of the development of character education in Indonesia. The method used in this article is library research, namely a research method obtained based on literature by analyzing facts and data from library sources and documents, so as to produce an in-depth analysis. In simple terms, the steps of writing history used include heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of the study show that in the era of the proclamation of independence, character education aims to build moral people who are wise, democratic, responsible for the welfare of society, love their homeland, and have a high patriotic spirit. The similarities of character education in Indonesia from the proclamation of independence to the reformation are that Pancasila and the 1945 Constitution are used as the basis for attitudes, behavior, and actions of citizens. In government affairs, both are used as the basis for making and taking policies in the implementation of character education. The differences in character education from the proclamation of independence to the reformation are influenced by social, political, economic, and cultural aspects of the character education policies taken.

Keywords: Character Education, Era of the Proclamation of Independence, Era of the New Order, Era of Reformation.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penamaan nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan. Pengembangan karakter bangsa dapat dilakukan melalui perkembangan karakter individu seseorang. Akan tetapi, karena manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka perkembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan. Artinya, perkembangan budaya dan karakter dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial, budaya masyarakat, dan budaya bangsa. Lingkungan sosial dan budaya bangsa adalah Pancasila, jadi pendidikan budaya dan karakter adalah mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik melalui pendidikan hati, otak, dan fisik. Oleh karena itu, pembinaannya pun harus oleh guru. Dengan demikian, kurang tepat jika dikatakan bahwa mendidik para siswa agar memiliki karakter bangsa hanya ditimpahkan pada guru mata pelajaran tertentu, misalnya guru PKN atau Guru PAI. Walaupun dapat dipahami bahwa yang dominan untuk mengajarkan pendidikan karakter bangsa adalah para guru yang relevan dengan pendidikan karakter bangsa. Tanpa terkecuali, semua guru harus menjadikan dirinya sebagai sosok teladan yang berwibawa bagi para siswanya. Sebab tidak akan memiliki makna apapun bila seorang guru PKN mengajarkan menyelesaikan suatu masalah yang bertentangan dengan cara demokrasi, sementara guru lain dengan cara otoriter. Atau seorang guru

pendidikan agama dalam menjawab pertanyaan para siswanya dengan cara yang nalar sementara guru lain hanya mengatakan asal-asalan dalam menjawab.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa pendidikan karakter membawa dampak yang relevan terhadap perkembangan hidup manusia. Dari generasi ke generasi pendidikan karakter lekat dengan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Begitu pula dari segi historis, pendidikan karakter telah digelorkan oleh bangsa Indonesia dari awal kemerdekaan sampai saat ini. Sebagaimana pemerintah di awal kemerdekaan yang menggelorkan pembangunan watak dan karakter bangsa Indonesia sebagai suatu kesadaran patriotisme. Kemudian pada masa Orde Baru terdapat Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) yang difungsikan untuk membentuk manusia yang Pancasilais. Sebagai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, pendidikan karakter dapat dikembangkan dalam ruang-ruang pendidikan formal dengan lebih terarah, berlaku secara universal, dan praktis. Oleh karena itu tulisan ini ingin mengkaji tentang perkembangan pendidikan karakter pada era proklamasi kemerdekaan, orde baru, sampai reformasi serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan karakteristik perkembangan pendidikan karakter di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan library research, yakni penulisan berdasarkan literatur atau metode kepustakaan. Metode yang digunakan dalam analisis perkembangan pendidikan karakter di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai era reformasi menggunakan langkah-langkah penelitian sejarah. Hariyono

(1995) mengemukakan langkah-tahap-tahap penelitian sejarah, yaitu (1) heuristik, (2) kritik, (3) interpretasi, dan (4) historiografi. Pada tahap heuristik, pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku dan arsip yang memuat tentang pendidikan karakter dan sejarah pendidikan di Indonesia.

Perbedaan sumber-sumber kepustakaan akan diuji kebenarannya dengan melakukan verifikasi sumber, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Setelah melakukan verifikasi ialah interpretasi, yakni melakukan pemahaman mendalam pada buku-buku koran, jurnal, majalah, serta dokumen-dokumen yang mendukung pengkajian. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya subjektivitas atas suatu pandangan tertentu. Pada tahap historiografi menekankan analisis secara kritis terhadap peristiwa, sehingga menghasilkan sintesis dari seluruh pengkajian yang telah dilakukan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Karakter di Era Proklamasi Kemerdekaan

Pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari proklamasi Indonesia yang dimana saat itu adalah awal perkembangan pemerintahan bangsa Indonesia. Yang dimana hari proklamasi adalah hal yang sangat penting dan bersejarah bagi Indonesia. Sebagai negara yang sudah merdeka sudah seharusnya Indonesia menyusun sistem kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dari sistem yang disusun terdapat sistem pendidikan yang juga diinginkan oleh bangsa Indonesia untuk seluruh rakyat. Setelah Kemerdekaan, Indonesia melakukan perubahan dari berbagai bidang salah satunya pendidikan. Perubahan pada bidang pendidikan merupakan dasar dan harapan bangsa yang merdeka. Sehingga dengan melihat harapan bangsa Indonesia, bidang pendidikan mengalami

perubahan. Terutama pada landasan filosofi pendidikan, tujuan pendidikan, sistem pendidikan, dan kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia.

1. Fase Awal Kemerdekaan (1945-1950)

Setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia mengalami banyak perubahan di segala aspek kehidupan, salah satunya adalah aspek pendidikan. Pada tanggal 19 Agustus 1945 pemerintah Indonesia membentuk Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Ki Hadjar Dewantara. Sebagai kebijakan awal di bidang pendidikan, Ki Hadjar Dewantara mengeluarkan instruksi umum yang berisi upaya untuk menghilangkan sistem pendidikan kolonial warisan Belanda dan ingin lebih mengutamakan materi dan semangat patriotisme. Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dalam (Moestoko, 1986) menyebutkan bahwa pendidikan harus mampu membangun semangat kebangsaan dan patriotisme.

2. Fase Demokrasi Liberal (1950-1959)

Memasuki tahun 1950 diawali dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai hasil dari kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang telah ditandatangani pada 2 November 1949. Kepemimpinan RIS masih berada di bawah kendali Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai perdana menteri. Perubahan bentuk negara berdampak pada hal-hal yang bersifat fundamental, sehingga muncul gerakan sosial masyarakat yang berupaya merongrong kekuasaan RIS. Serangan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) dengan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), petualangan Kapten Andi Azis, gerakan separatisme Republik Maluku Selatan (RMS), hingga upaya Belanda menduduki kembali

wilayah Indonesia, menjadi bukti kondisi RIS pada saat itu belum stabil.

3. Fase Demokrasi Liberal (1950-1959)

Memasuki tahun 1950 diawali dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai hasil dari kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang telah ditandatangani pada 2 November 1949. Kepemimpinan RIS masih berada di bawah kendali Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai perdana menteri. Perubahan bentuk negara berdampak pada hal-hal yang bersifat fundamental, sehingga muncul gerakan sosial masyarakat yang berupaya merongrong kekuasaan RIS. Serangan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) dengan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), petualangan Kapten Andi Azis, gerakan separatisme Republik Maluku Selatan (RMS), hingga upaya Belanda menduduki kembali wilayah Indonesia, menjadi bukti kondisi RIS pada saat itu belum stabil.

4. Fase Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Pada periode ini, Ir. Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sekaligus menjadi tonggak awal pelaksanaan sistem demokrasi terpimpin (Assegaf, 2005). Berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dalam pandangan politik dianggap memperkuat posisi presiden dan memperlemah peranan partai politik pada masa itu. Pidato Soekarno pada 17 Agustus 1959 yang menguraikan konsep ideologi demokrasi terpimpin menyerukan semangat revolusi, keadilan sosial, dan pelengkapan lembaga-lembaga negara demi revolusi yang berkesinambungan (Riklefs, 2005).

a. Pendidikan Karakter di Era Orde Baru

Pada masa Orde Baru (1966-1998), pendidikan karakter bangsa dilakukan dalam kerangka stabilitas nasional dan pementapan jati diri bangsa. Ketika Orde Baru berkuasa, tujuan

pendidikan nasional adalah untuk membentuk manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi mutunya. Pada masa itu, gerakan untuk mendukung kemandirian pangan dan cinta produk Indonesia ditandai dengan adanya program swasembada beras dan pangan secara nasional, dan swadesi untuk mencintai produk Indonesia. Jargon politik yang dikembangkan adalah melalui “Trilogi Pembangunan”, yaitu: stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan (Moertopo, 1974; Both & McIlwley, 1983; dan Mas’oed, 1989). Pada masa Orde Baru pula, pendidikan karakter menggunakan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

b. Pendidikan Karakter di Era Reformasi

Kemunduran pemerintahan Orde Baru yang ditandai dengan adanya perubahan mendasar atas segala aspek kehidupan, reformasi dinilai sebagai tonggak kelanjutan pemerintahan yang lebih baik. Di bidang pendidikan, kebijakan reformasi perlu memperhatikan berbagai persoalan yang sedang dan akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, termasuk manajemen, perencanaan, sampai praksis pendidikan ditingkat mikro (Suyanto, 2000). Pendidikan pada masa reformasi harus mengalami perbaikan, terarah serta mampu menjawab tantangan dan kebutuhan bangsa di masa yang akan datang.

c. Persamaan dan Perbedaan Pendidikan Karakter Sejak Awal Kemerdekaan Sampai Era Reformasi

Perkembangan bangsa Indonesia dari awal kemerdekaan hingga reformasi tentu mengalami dinamika sosial yang panjang. Masing-masing periode memiliki tantangan yang beragam. Di bidang pendidikan, dinamika sosial politik membawa dampak yang cukup mendasar. Berbagai kebijakan pemerintah, berupa perangkat

hukum, kurikulum di bidang pendidikan pun juga ikut mengalami perubahan. Kendati demikian, pendidikan karakter dari awal kemerdekaan sampai reformasi masih dipertahankan untuk menjamin kualitas sumber daya manusia yang unggul. Berikut ialah tabel karakteristik perkembangan pendidikan karakter di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga reformasi.

IV. KESIMPULAN

Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai dua hal penting, yakni (1) sebagai pewarisan budaya dan karakter bagi generasi muda, (2) proses pengembangan karakter untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perkembangan pendidikan karakter di Indonesia bersifat dinamis. Dari fase awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, sampai reformasi pendidikan karakter digunakan sebagai wahana pembangunan watak atau karakter bangsa agar menjadi warga negara yang unggul.

Pendidikan karakter di awal kemerdekaan sampai reformasi memiliki kesamaan karakteristik, yakni dilandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai landasan sikap, perilaku, dan dasar pengambilan kebijakan nasional.

Perbedaan pendidikan karakter sejak awal kemerdekaan sampai reformasi dipengaruhi oleh aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Di awal kemerdekaan (1945-1950), karena masih diselimuti semangat revolusi, pendidikan karakter terintegrasi pada cita-cita nasional dan fokus pada pembangunan karakter warga negara yang memiliki semangat kebangsaan dan patriotisme. Di masa demokrasi liberal (1950-1959) pendidikan karakter bertujuan ideologis untuk meningkatkan kebebasan demokrasi dan nasionalisme.

Sedangkan, pada masa demokrasi terpimpin (1959-1965) pendidikan karakter dilandaskan pada Pancasila dan Manifestasi Politik (Manipol) USDEK serta menjunjung tinggi prinsip Pancawardhana yang terdiri dari (a) cinta bangsa dan tanah air, moral nasional/ internasional/ keagamaan; (b) perkembangan kecerdasan; (c) perkembangan emosional-artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin; (d) perkembangan keprigelan atau kerajinan tangan; (e) perkembangan jasmani.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi. (2020). *Pendidikan dari Masa Ke Masa*. Bandung: CV. Armico.
- Akbar, Sa'dun. 2020. Revitalisasi Pendidikan karakter di Sekolah Dasar. Makalah disajikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) UM, Malang, 8 Juni.
- Ariandy, Mohammad, (2019), 'Kebijakan Kurikulum Dan Dinamika Penguatan Pendidikan Karakter Di Indonesia', *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 3.2 137–68.
- Balitbang Puskur Kemdikbud, *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah*, Jakarta: Puskur Kemdikbud, 2018.
- Berkowitz & Bier, Melinda. 2019. *What Works in Character Education: A research-driven guid for Educators*. Washington: CEP.
- Dalmeri. 2019. Pendidikan untuk Pengembangan Karakter (Telaah Terhadap Gagasan Thomas Lickona dalam *Educating for Character*), *Jurnal Al-Ulum* 14 (1).
- Djojonegoro, Wardiman. 2019. *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.

- Hidayatullah, Furqon. 2020. Pendidikan Karakter: Membangun Karakter Bangsa. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Sadirman. 2020. Antara Pendidikan Karakter dan Pendidikan IPS. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran IPS. FIS UM, Malang, 5 Desember 2020.
- Sartini. 2019. Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat. *Jurnal Filsafat*, 37(2).
- Shofa, Abd. Mu'id Aris. 2019. Pendidikan Karakter di Sekolah Sejak Proklamasi Kemerdekaan Sampai Era Reformasi, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang* 1(1).
- Sjamsuddin, H., Sastradinata, K., & Hasan, S.H. (2020). *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1966)*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sjamsuddin, Kosoh Sastradinata, Said Hamid Hasan (2020). *Sejarah pendidikan di Indonesia zaman kemerdekaan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Somarsono Moestoko. (2019). *Pendidikan Indonesia dari jaman ke jaman*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Subkhan, Edi. 2018. Ideologi, Kekuasaan, dan Pengaruhnya pada Arah Sistem Pendidikan Nasional Indonesia (1950-1965), *Journal of Indonesian History* 7(1), (Online), <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih>.
- Sudrajat, Akhmad. 2020. Pengembangan Karakter.(online), (<http://akhmad sudrajat.wordpress.com/pengembangan karakter>).
- Suyanto, dkk. 2020. Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Suradi, et.al. 2019. *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventaris dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Suyanto, dkk. 2018. Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Wahyuni, Fitri. 2019. Kurikulum dari Masa ke Masa (Telaah Atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan di Indonesia). *Jurnal Al-Adabiya*, 10(2).